

**KEUANGAN PERUSAHAAN (STUDI KASUS: PT. KAWASAN
INDUSTRI MEDAN (PERSERO), SUMATERA UTARA)**

Oleh:

RAHMAT YAMIN HARAHAP

NIM. 51.14.3.203

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN 2018 M / 1439 H**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 1 PADA PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN PERUSAHAAN (STUDI KASUS: PT. KAWASAN
INDUSTRI MEDAN (PERSERO), SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata
1 (S1) Akuntansi Syariah pada Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

RAHMAT YAMIN HARAHAHAP

NIM. 51.14.3.203

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN 2018 M / 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RAHMAT YAMIN HARAHAHAP**
NIM : 51143203
Tempat dan Tanggal Lahir : Padang Garugur, 30 September 1995
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Tangkul I No. 84C Medan Tembung, Medan

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN PSAK 1 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN (STUDI KASUS: PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO), SUMATERA UTARA)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 11 Mei 2018

Yang Membuat Pernyataan



RAHMAT YAMIN HARAHAHAP

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 1 PADA PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN PERUSAHAAN (STUDI KASUS: PT. KAWASAN
INDUSTRI MEDAN (PERSERO), SUMATERA UTARA)**

Oleh:

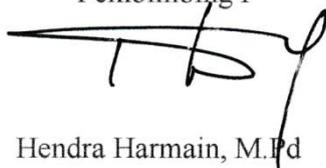
RAHMAT YAMIN HARAHAHAP

NIM. 51143203

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Syariah (S. Akun) Pada Jurusan Akuntansi Syariah

Medan, 11 Mei 2018

Pembimbing I



Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 197305101998031003

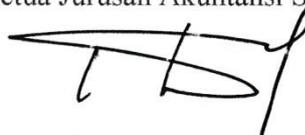
Pembimbing II



Laylan Syafina, M. Si
NIP. 1991082672018012002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Hendra Harmain, M. Pd
NIP. 197305101998031003

ABSTRAK

RAHMAT YAMIN HARAHAP. NIM. 51.14.3.203. ANALISIS PENERAPAN PSAK 1 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN (STUDI KASUS: PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO), SUMATERA UTARA). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan pada PT. Kawasan Industri Medan (Persero), Sumatera Utara. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 1 pada penyajian laporan keuangan PT. Kawasan Industri Medan (Persero), Sumatera Utara, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada Laporan Keuangan PT. Kawasan Industri Medan (Persero), Sumatera Utara, untuk mengamati bagaimana sistematisasi penyajian elemen-elemen laporan keuangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan PSAK 1. Metode observasi dan wawancara digunakan untuk memperkuat dan memperdalam kajian terhadap objek yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data dibagi ke dalam tiga bagian, yakni (1) reduksi data, (2) tahap pemaparan data, dan (3) tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini diawali dengan analisis komparatif terhadap subjek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal sistematisasi penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian dan pembandingan dua unsur, yakni Laporan Keuangan PT. Kawasan Industri Medan (Persero), Sumatera Utara Tahun 2017, dan PSAK 1 tentang standar penyajian laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan PT. Kawasan Industri Medan (Persero), Sumatera Utara telah menyajikan laporannya dengan benar sebagaimana yang disyaratkan dalam PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Kata Kunci: PSAK 1, Penyajian Laporan Keuangan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah Swt., yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Peneliti mampu menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 1 Pada Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan (Studi Kasus: PT. Kawasan Industri Medan (Persero), Sumatera Utara)” dengan baik dan lancar. Peneliti menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Saparuddin Siregar, M.Ak, selaku dosen pembimbing akademik, yang berkontribusi banyak dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Peneliti selama perkuliahan.
4. Bapak Hendra Harmain, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dan selaku dosen pembimbing skripsi I, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyusun skripsi.
5. Ibu Laylan Syafina, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi II, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyusun skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

7. Bapak Eka Wahyudin, selaku Manajer SDM dan Umum PT. Kawasan Industri Medan (Persero), Sumatera Utara yang telah memberikan izin penelitian kepada Peneliti.
8. Ibu Luker Sihombing dan Ibu Maria P. Purba, selaku pegawai PT. Kawasan Industri Medan (Persero), Sumatera Utara yang telah membantu Peneliti dalam melaksanakan penelitian di PT. Kawasan Industri Medan (Persero), Sumatera Utara.
9. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tidak pernah lelah mendidik Ananda agar menjadi anak yang berbakti dan juga kepada adik-adik saya tercinta: Ali Kadir Harahap, Syahril Halomoan Harahap, dan Ali Yahya Harahap.
10. Sahabat Menuju Surga: Bayu Lian Surbakti, Fitri Rahmadani Br. Simanjorang, Siska Yunita Br. Lombu, Siti Aisyah, dan Wiwit Muliono. Teman-teman Aks A stambuk 2014 yang selama empat tahun bersama.
11. Semua pihak yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu per satu.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya. Terimakasih, wassalam.

Medan, 11 Mei 2018

RAHMAT YAMIN HARAHAHAP
NIM. 51.14.3.203

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PENELITIAN RELEVAN	
A. Kajian Teoritis	10
1. Standar Akuntansi Keuangan	10
a. Sejarah Standar Akuntansi Keuangan	10
b. Kerangka Dasar	11
c. Asumsi Dasar	15
d. Unsur-unsur Laporan Keuangan	16
e. Pengakuan Unsur-unsur Laporan Keuangan	19
f. Pengukuran Unsur-unsur Laporan Keuangan	21
g. Konsep Modal dan Pemeliharaan Modal	23
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (PSAK 1)	23
a. Pengertian PSAK 1	23
b. Persyaratan Penyajian Laporan Keuangan	26
c. Struktur Laporan Keuangan	28

d. Persyaratan Minimum Isi Laporan Keuangan	29
e. Revisi PSAK 1	30
B. Penelitian Relevan.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	33
B. Variabel Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan	39
1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	39
2. Visi dan Misi Perusahaan	41
3. Tujuan dan Ruang Lingkup Usaha	42
4. Struktur Organisasi	43
5. Pembagian Tugas dan Wewenang	45
B. Hasil Penelitian	51
1. Laporan Keuangan PT. Kawasan Industri Medan	51
2. Ilustrasi Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 1	54
3. Pembahasan	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ilustrasi Penyajian Laporan Posisi Keuangan Menurut PSAK 1	3
Tabel 1.2 Laporan Posisi Keuangan PT. Kawasan Industri Medan	4
Tabel 1.3 Ilustrasi Penyajian Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Menurut PSAK 1	5
Tabel 1.4 Ilustrasi Penyajian Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain PT. Kawasan Industri Medan	7
Tabel 4.1 Laporan Posisi Keuangan PT. Kawasan Industri Medan	51
Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi PT. Kawasan Industri Medan	53
Tabel 4.3 Ilustrasi Penyajian Laporan Posisi Keuangan Menurut PSAK 1	54
Tabel 4.4 Ilustrasi Penyajian Laporan Laba Rugi Menurut PSAK 1	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas, karena akuntansi adalah bahasa bisnis (*business language*). Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa mendatang dan pengambilan keputusan terkait dengan entitas. Akuntansi tidak hanya untuk entitas bisnis, tetapi semua entitas memerlukan akuntansi, karena setiap entitas perlu melaporkan kondisi keuangan dan kinerjanya dari aspek keuangan. Entitas pemerintah memerlukan akuntansi untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan kekayaan pemerintah yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah serta akuntabilitas keuangan suatu unit pemerintah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membutuhkan akuntansi untuk melaporkan hasil kerja dan kondisi keuangan LSM tersebut kepada para penyandang dana dan pemangku kepentingan lainnya.¹

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan dan penggabungan semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan usahanya. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu entitas. Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

¹Dwi Martani, *et al.* *Akuntansi Keuangan Menengah: Berbasis PSAK*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 8.

PSAK 1 adalah standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan di Indonesia. Pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*) yang selanjutnya disebut ‘laporan keuangan’ agar dapat dibandingkan, baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.²

Dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, terdapat perbedaan antara penyajian laporan posisi keuangan, dan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT. Kawasan Industri Medan (Persero) Sumatera Utara, dengan format penyajian laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagaimana yang diilustrasikan dalam PSAK 1. Perbedaan tersebut berupa penamaan akun dan jumlah pos yang berbeda. Beranjak dari perbedaan-perbedaan inilah, peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor kesengajaan atau karena ketidakpahaman mengenai PSAK 1. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada table 1.1 sampai tabel 1.4 berikut ini:

² Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan: Efektif Per 1 Januari 2017*.

Tabel 1.1 Ilustrasi Penyajian Laporan Posisi Keuangan Menurut PSAK 1

KELOMPOK USAHA XYZ		
Laporan posisi keuangan per 31 Desember 20X7		
(dalam ribuan Rupiah)		
	20X7	20X6
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	312.400	322.900
Piutang Usaha	91.600	110.800
Persediaan	135.230	132.500
Aset Lancar lain	25.650	12.540
Total Aset Lancar	564.880	578.740
Aset Tidak Lancar		
Aset keuangan tersedia untuk dijual	142.500	156.000
Investasi dalam entitas asosiasi	100.150	110.770
Aset tetap	350.700	360.020
Aset tak berwujud lain	227.470	227.470
<i>Goodwill</i>	80.800	91.200
Total Aset Tidak Lancar	901.620	945.460
Total Aset	1.466.500	1.524.200
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha dan utang lain	115.100	187.620
Pinjaman jangka pendek	150.000	200.000
Bagian pinjaman jangka panjang	10.000	20.000
Utang pajak jangka pendek	35.000	42.000
Provisi jangka pendek	5.000	4.800
Total Liabilitas Jangka Pendek	315.100	454.420
Liabilitas Jangka Panjang		
Pinjaman jangka panjang	120.000	160.000
Pajak tangguhan	28.800	26.040
Provisi jangka panjang	28.850	52.240
Total Liabilitas Jangka Panjang	177.650	238.280
Total Liabilitas	492.750	692.700
EKUITAS		
Ekuitas yg dpt diatribusikan kpd pemilik entitas induk		
Modal Saham	650.000	600.000
Saldo Laba	243.500	161.700
Komponen ekuitas lain	10.200	21.200
	903.700	782.900
Kepentingan non pengendali	70.050	48.600
Total Ekuitas	973.750	831.500
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.466.500	1.524.200

Tabel 1.2 Ilustrasi penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menurut PSAK 1

KELOMPOK USAHA XYZ		
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7		
(dalam ribuan rupiah)		
	20X7	20X6
Pendapatan	390.000	355.000
Beban pokok penjualan	-245.000	-230.000
Laba bruto	145.000	125.000
Penghasilan laba	20.667	11.300
Biaya distribusi	-9.000	-8.700
Beban administrasi	-20.000	-21.000
Beban lain-lain	-2.100	-1.200
Biaya pendanaan	-8.000	-7.500
Bagian laba entitas asosiasi	35.100	30.100
Laba sebelum pajak	161.667	128.000
Beban pajak penghasilan	-40.417	-32.000
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	121.250	96.000
Kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	0	-30.500
Laba tahun berjalan	121.250	65.500
Penghasilan komperhensif lain		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan revaluasi aset teap	933	3.367
Pengukuran kembali atas program badan pasti	-667	1.333
Bagian penghasilan komperhensif lain entitas asosiasi	400	-700
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-166	-1.000
	500	3.000
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	5.334	10.667
Aset keuangan tersedia untuk dijual	-24.000	26.667
Lidung nilai atas arus kas	-667	-4.000
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	4.833	-8.334
	-14.500	25.000
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	-14.000	28.000
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	107.250	93.500

Laba yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	97.000	52.400
Kepentingan non pengendali	24.250	13.100
	121.250	65.500
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	85.800	74.800
Kepentingan non pengendali	21.450	18.700
	107.250	93.500
Laba per saham (dalam rupiah)	0,46	0,3

Tabel 1.3 Laporan Posisi Keuangan PT. Kawasan Industri Medan

PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO) LAPORAN POSISI KEUANGAN Periode 31 Desember 2017 (Disajikan dalam Rupiah)		
Uraian	2017	2016
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	80.684.400.650	83.023.620.299
Piutang – neto	87.153.245.517	43.471.218.839
Piutang lain-lain	12.852.452.289	12.917.079.027
Piutang Karyawan	366.758.657	128.348.547
Persediaan – neto	94.136.106.747	102.026.498.055
Pajak dibayar dimuka	11.521.687.487	7.156.103.852
Biaya dibayar Dimuka	134.672.597	583.880.629
JUMLAH ASET LANCAR	286.849.323.944	249.306.749.248
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang non lancar – neto	5.062.316.933	5.313.446.967
Aset pajak tangguhan – neto	372.056.520	372.056.520
Aset tetap – neto	12.317.378.429	9.443.330.963
Properti Investasi – neto	96.397.906.106	39.024.353.799
Aset dalam Konstruksi	14.417.495.046	72.123.129.772
Sarana dan Prasarana – neto	113	113
Aset lain-lain – neto	1.258.341.719	873.037.999
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	129.825.494.866	127.149.356.133
JUMLAH ASET	416.674.818.810	376.456.105.381

LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	5.727.486.500	21.331.910.715
Utang lain-lain	824.415.877	708.059.301
Biaya yang masih harus dibayar	7.248.662.458	5.998.748.735
Utang Pajak	20.618.858.685	9.927.561.919
Pendapatan Diterima Dimuka	4.994.624.176	4.827.077.962
Liabilitas Diestimasi atas Sarana & Prasarana	1.828.610.436	1.828.610.436
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	41.242.658.132	44.621.969.068
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Pendapatan yang Ditangguhkan	104.176.340	
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	104.176.340	
JUMLAH LIABILITAS	41.346.834.472	44.621.969.068
EKUITAS		
Modal Saham	150.000.000.000	150.000.000.000
Tambahan modal disetor		
Penghasilan Komprehensif lain		
Saldo laba (defisit)		
Ditentukan penggunaannya	178.214.499.820	145.637.771.409
Tidak ditentukan penggunaannya	47.113.484.519	36.196.364.904
JUMLAH EKUITAS	375.327.984.339	331.834.136.313
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	416.674.818.811	376.456.105.381

Tabel 1.4 Ilustrasi Penyajian Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain PT. Kawasan Industri Medan (Persero)

PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO)		
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Periode Berahir 31 Desember 2017		
Uraian	2017	2016
Penjualan	Rp 81.785.137.640	Rp 41.252.880.811
Beban Pokok Penjualan	Rp (23.583.247.317)	Rp (4.171.424.992)
LABA BRUTO	Rp 58.201.890.323	Rp 37.081.455.819
Penjualan lain-lain	Rp 68.319.932.767	Rp 56.434.747.040
Beban Pokok Penjualan lain	Rp (58.289.207.549)	Rp (33.410.599.528)
Beban Operasional	Rp (22.897.526.800)	Rp (22.705.618.772)
LABA USAHA	Rp 45.335.088.741	Rp 37.399.984.559
Beban Keuangan	Rp (42.332.388)	Rp (50.358.459)
Pendapatan Keuangan	Rp 5.743.861.167	Rp 4.785.782.054
LABA SEBELUM PAJAK	Rp 51.036.617.520	Rp 42.135.408.154
Manfaat (beban) pajak penghasilan	Rp (3.923.133.000)	Rp (5.939.043.250)
LABA TAHUN BERJALAN	Rp 47.113.484.520	Rp 36.196.364.904
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan aktuarial atas program imbalan pasti - neto setelah pajak		
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	Rp 47.113.484.520	Rp 36.196.364.904

Mengingat bahwasanya PSAK 1 adalah standar akuntansi keuangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang sewaktu-waktu bisa saja mengalami perubahan atau revisi, dan sebagaimana yang terakhir kali direvisi pada PSAK 1 efektif per 1 Januari 2017. Jadi, penelitian ini akan membahas bagaimana tingkat kesesuaian penyajian laporan keuangan entitas dengan yang disyaratkan oleh PSAK 1 dan apakah dalam penyajian laporan

keuangannya, entitas selalu *update* PSAK 1, seperti revisi terakhir pada PSAK 1 yang efektif per 1 Januari 2017, maka penelitian ini akan mengangkat judul: “*Analisis Penerapan PSAK1 Pada Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan (Studi Kasus: PT. Kawasan Industri Medan (Persero), Sumatera Utara)*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Adanya perbedaan penyajian laporan posisi keuangan pada PT. Kawasan Industri Medan (Persero) Sumatera Utara.
2. Adanya perbedaan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada PT. Kawasan Industri Medan (Persero) Sumatera Utara.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya terarah, dan tidak meluas serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu pada penyajian laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT. Kawasan Industri Medan (Persero) Sumatera Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, makarumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Laporan Posisi Keuangan, dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain PT. Kawasan Industri Medan (Persero) Sumatera Utara telah disajikan sesuai dengan ketentuan PSAK1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.”

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PSAK 1 pada penyajian laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif di PT. Kawasan Industri Medan (Persero) Sumatera Utara.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan PT. Kawasan Industri Medan (Persero)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam pembuatan Laporan Keuangan, menyempurnakan dan menambah keyakinan untuk penyusunan Laporan Keuangan.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana penerapan akuntansi khususnya pembuatan laporan keuangan yang diperoleh selama kuliah, dan mengetahui kondisi nyata dalam tata cara pembuatan dan penyusunan Laporan Keuangan.

3. Bagi pembaca atau pihak lainnya: dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Kajian Teoritis

1. Standar Akuntansi Keuangan

a. Sejarah Standar Akuntansi Keuangan

Pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur GAAP (*Generally Accepted Accounting Principle*) dan GAAS (*Generally Accepted Auditing Standards*). Menjelang pengaktifan pasar modal di Indonesia pada tahun 1974, sebagai wadah profesi akuntansi yang senantiasa mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan akuntan dalam dunia bisnis, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kemudian membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) serta melakukan kodifikasi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku “Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)” yang mengacu pada US GAAP.³

Seiring dengan perkembangan pasar modal yang bergerak dengan sangat pesat, Komite PAI juga menerbitkan standar akuntansi khusus untuk industri dan badan hukum tertentu, antara lain standar akuntansi dana pensiun, perkoperasian, asuransi kerugian, minyak dan gas bumi, sewa guna usaha, perbankan, kehutanan, dan lainnya.

Pada tahun 1994, IAI melakukan revisi total terhadap PAI dan melakukan kodifikasi dalam buku “Standar Akuntansi Keuangan (SAK)” yang mulai berharmonisasi dengan standar akuntansi keuangan internasional. Perubahan nama dari PAI menjadi SAK dilakukan dengan pertimbangan bahwa prinsip

³Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan: Efektif Per 1 Januari 2017*.

lebih bersifat baku dan memberikan konsep dasar penyusunan standar, sedangkan standar lebih fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan dinamika bisnis. Karena pergantian nama tersebut, maka Komite PAI juga berganti nama menjadi Komite SAK. Untuk menghasilkan standar akuntansi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha, SAK terus di revisi dan disempurnakan hingga tujuh kali yakni pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 September 2007, dan 1 Juli 2009.⁴

b. Kerangka Dasar

Kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Tujuan kerangka dasar adalah:⁵

1. Membantu Dewan Standar Akuntansi IAI dalam pengembangan standar akuntansi keuangan baru dan dalam melakukan tinjauan atas SAK yang ada.
2. Membantu DSAK IAI dalam mempromosikan harmonisasi peraturan, standar akuntansi dan prosedur yang terkait dengan penyajian laporan keuangan.
3. Membantu DSAK IAI dalam pengembangan standar lokal.
4. Membantu auditor dalam memberikan opini mengenai apakah laporan keuangan telah sesuai dengan SAK.
5. Membantu pengguna laporan keuangan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Kerangka konseptual menjelaskan tentang:

- a. Tujuan pelaporan keuangan
- b. Karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna
- c. Defenisi, pengakuan, pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, dan
- d. Konsep modal dan pemeliharaan modal

Berikut ini akan dibahas mengenai ruang lingkup kerangka konseptual.⁶

1) Tujuan Pelaporan Keuangan Bertujuan Umum

Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan tersebut termasuk pembelian, penjualan, atau kepemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang, serta penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya.

2) Karakteristik Kualitatif Informasi Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan diterapkan untuk informasi keuangan yang tersedia dalam laporan keuangan, dan juga informasi keuangan yang tersedia dengan cara lainnya. Agar informasi keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus relevan dan dapat merepresentasikan secara tepat apa yang akan dipresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut dapat dibandingkan (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan dapat dipahami (*understandable*). Karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan dibagi ke dalam dua bahagian, yakni

⁶*Ibid.*

karakteristik kualitatif fundamental dan karakteristik kualitatif peningkat.

a) Karakteristik kualitatif fundamental

Karakteristik kualitatif fundamental meliputi relevansi dan representasi tepat.

(1) Relevan

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori dan atau keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai input yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil (outcome) masa depan. Sedangkan informasi keuangan dikatakan memiliki nilai konfirmatori, jika menyediakan umpan balik (mengkonfirmasi atau mengubah) tentang evaluasi sebelumnya.

(2) Representasi Tepat

Laporan keuangan mempresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain mempresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus mempresentasikan secara tepat fenomena yang akan dipresentasikan. Agar dapat menunjukkan representasi tepat dengan sempurna, tiga karakteristik harus dimiliki, yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Sebuah penjabaran lengkap mencakup seluruh informasi yang diperlukan pengguna agar dapat memahami fenomena yang digambarkan, termasuk seluruh deskripsi dan penjelasan yang diperlukan. Sebuah penjabaran yang netral adalah tanpa bias dalam pemilihan

dan penyajian informasi keuangan. Penjabaran netral tidak diarahkan, tidak dibobotkan dan tidak ditekankan untuk memanipulasi data untuk meningkatkan kemungkinan bahwa informasi keuangan akan lebih diterima oleh pengguna. Sedangkan representasi tepat tidak berarti akurat dalam segala hal. Bebas dari kesalahan berarti tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendeskripsikan fenomena, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang dilaporkan telah dipilih dan diterapkan tanpa ada kesalahan dalam prosesnya.

b) Karakteristik kualitatif peningkat

Karakteristik kualitatif peningkat adalah karakteristik kualitatif yang berfungsi untuk meningkatkan kegunaan informasi yang relevan, dan dipresentasikan secara tepat. Karakteristik ini meliputi keterbandingan, keterverifikasian, ketepatanwaktuan dan keterpahaman.

(1) Keterbandingan

Keterbandingan adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam, dan perbedaan antara pos-pos. Berbeda dengan karakteristik kualitatif lainnya, keterbandingan tidak berhubungan dengan satu pos melainkan sebuah perbandingan yang mensyaratkan paling tidak dua pos.

(2) Keterverifikasian

Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomik secara tepat sebagaimana mestinya. Keterverifikasian berarti bahwa berbagai pengamat independen dengan pengetahuan yang berbeda-beda dapat mencapai konsensus, meskipun

kerap kali tidak mencapai kesepakatan bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi tepat.

(3) Ketepatanwaktuan

Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka.

(4) Keterpahaman

Pengklasifikasian, pengkarakteristikan, dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas dapat mempermudah pengguna dalam memahami informasi keuangan. Laporan keuangan disiapkan untuk pengguna yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomik serta pengguna yang meninjau dan menganalisis informasi dengan tekun. Terkadang, pengguna yang terinformasikan dengan baik dan tekun juga perlu mencari bantuan dari seorang penasehat untuk memahami informasi tentang fenomena ekonomik yang kompleks.

c. Asumsi Dasar

Asumsi dalam penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi ini laporan keuangan disusun dan diharapkan dapat memenuhi tujuan laporan keuangan. Basis akrual merupakan asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, berdasarkan konsep akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya (bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan). Konsep akrual lebih mencerminkan substansi ekonomi suatu transaksi, berdasarkan asumsi ini, entitas tidak hanya mengakui

kas yang diterima tetapi juga mengakui klaim kepada pihak lain (piutang), liabilitas kepada pihak lain, dan mengakui aset selain kas.⁷

d. Unsur-unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang dikelompokkan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonomiknya. Kelompok besar ini merupakan unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan dalam laporan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan unsur-unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

Penyajian unsur-unsur ini dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi memerlukan proses subklasifikasi. Sebagai contoh, aset dan liabilitas diklasifikasikan menurut sifat atau fungsinya dalam bisnis entitas untuk menyajikan informasi dengan cara yang paling berguna bagi pengguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomik.⁸

1) Laporan Posisi Keuangan

Unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas yang didefinisikan sebagai berikut:

a) Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir kepada entitas. Manfaat ekonomik masa depan aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

langsung, pada arus kas dan setara kas kepada entitas. Potensi tersebut dapat berupa sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional entitas. Dapat pula berbentuk sesuatu yang bisa dikonversikan menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas. Entitas biasanya menggunakan aset untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pelanggan. Manfaat ekonomik masa depan aset dapat mengalir ke entitas dengan beberapa cara, yakni:

- (1) Digunakan untuk memproduksi barang atau jasa;
- (2) Dipertukarkan dengan aset lain;
- (3) Digunakan untuk menyelesaikan liabilitas; dan
- (4) Didistribusikan kepada pemilik entitas.

b) Liabilitas

Liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Karakteristik esensial liabilitas adalah bahwa entitas memiliki kewajiban kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau persyaratan perundang-undangan. Kewajiban biasanya timbul hanya ketika aset telah diserahkan atau entitas telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli.

Penyelesaian kewajiban kini biasanya membuat entitas untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat ekonomik demi memenuhi klaim dari pihak lain. Penyelesaian kewajiban kini dapat dilakukan dengan cara:

- (1) Pembayaran kas;
- (2) Pengalihan aset lain;
- (3) Provisi jasa;
- (4) Penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain;
- (5) Konversi kewajiban menjadi ekuitas;
- (6) Pembatalan atau penghapusan kewajiban oleh kreditor.

c) Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan bergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Dalam kondisi normal, jumlah penggabungan ekuitas secara kebetulan hanya berkorespondensi dengan nilai pasar gabungan dari saham entitas atau jumlah yang dapat diperoleh dengan melepaskan aset neto satu per satu atau secara keseluruhan berdasarkan kelangsungan usaha.

2) Laporan Laba Rugi (Laporan Kinerja)

Laba seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar ukuran lain seperti imbal hasil investasi (*return on investment*) atau laba per saham (*earnings per share*). Unsur yang secara langsung berkaitan dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan, beban, dan laba sebagian besar bergantung pada konsep modal dan pemeliharaan modal yang digunakan entitas dalam menyusun laporan keuangannya. Unsur-unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut:

a) Penghasilan

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomik selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan pada kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Definisi penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan

keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti, dan sewa. Sedangkan keuntungan merepresentasikan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Keuntungan merepresentasikan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian sifatnya tidak berbeda dari pendapatan, sehingga tidak dianggap sebagai unsur yang terpisah dalam kerangka konseptual.

b) **Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pengeluaran atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan pada ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada pemilik. Definisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi beban pokok penjualan, beban gaji, beban penyusutan aset, dan lainnya. Kerugian merepresentasikan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau tidak timbul dari aktivitas entitas yang biasa.

e. Pengakuan Unsur-unsur Laporan Keuangan

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan dan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan unsur laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah moneter dan mencantumkannya dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria

pengakuan diakui dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos tersebut tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan. Pos yang memenuhi definisi unsur diakui jika:⁹

- 1) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomik masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir ke atau dari entitas.
- 2) Pos tersebut mempunyai biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal.

Adapun kriteria pengakuan unsur-unsur laporan keuangan adalah:

- 1) Probabilitas manfaat ekonomik masa depan

Konsep probabilitas digunakan dalam kriteria pengakuan yang mengacu pada derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir kepada atau dari entitas. Konsep tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian untuk mencerminkan karakter lingkungan dimana entitas tersebut melakukan kegiatan operasionalnya. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomik masa depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan.

- 2) Keandalan pengukuran

Kriteria pengakuan suatu pos yang kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Pada banyak kasus, biaya atau nilai harus diestimasi, penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi keandalannya.

Berikut ini akan dijelaskan pengakuan unsur-unsur laporan keuangan:

⁹*Ibid.*

a) Pengakuan Aset

Aset diakui dalam laporan posisi keuangan jika kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir kepada entitas dan aset tersebut mempunyai biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonomiknya dipandang tidak mungkin mengalir ke entitas setelah periode akuntansi berjalan.

b) Pengakuan Liabilitas

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika terdapat kemungkinan besar bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

c) Pengakuan Penghasilan

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi ketika ada kenaikan manfaat ekonomik masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

d) Pengakuan Beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi ketika penurunan manfaat ekonomik masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

f. Pengukuran Unsur-unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah moneter ketika unsur-unsur laporan keuangan akan diakui dan dicatat dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Proses ini mencakup pemilihan dasar pengukuran tertentu. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda

digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

1) Biaya historis (*historical cost*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau dalam keadaan tertentu, pada jumlah kas atau setara kas yang diekspektasikan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal.

2) Biaya kini (*current cost*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang seharusnya akan dibayarkan jika aset yang sama atau aset yang setara diperoleh sekarang. Liabilitas dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini.

3) Nilai realisasi/penyelesaian (*realisable/settlement value*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Liabilitas dicatat sebesar nilai penyelesaiannya, yakni sebesar jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan, yang diekspektasikan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

4) Nilai kini (*present value*)

Aset dicatat sebesar arus kas masuk bersih masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diekspektasikan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Liabilitas dicatat sebesar arus kas keluar bersih masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diekspektasikan akan

¹⁰*Ibid.*

diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

g. Konsep Modal dan Pemeliharaan Modal

Konsep modal keuangan dianut entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Ada dua konsep pemeliharaan modal dalam menciptakan laba, yakni:¹¹

1) Pemeliharaan modal keuangan

Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika jumlah finansial (uang) dari aset bersih akhir periode melebihi jumlah finansial (uang) dari aset bersih pada awal periode, setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada para pemilik dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama satu periode. Pemeliharaan modal keuangan dapat diukur baik dalam satuan moneter maupun dalam satuan daya beli yang konstan.

2) Pemeliharaan modal fisik

Menurut konsep ini, laba hanya dapat diperoleh jika kapasitas produktif fisik (kemampuan usaha) pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode, setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada, dan mengeluarkan setiap kontribusi dari, para pemilik selama satu periode.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (PSAK 1)

a. Pengertian PSAK 1

PSAK 1 adalah standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan di Indonesia. Pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*) yang selanjutnya disebut ‘laporan keuangan’ agar dapat

¹¹Martani, *et al. Akuntansi*, h. 30-48.

dibandingkan, baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Adapun pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Dalam Pernyataan ini juga memuat beberapa istilah yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Berikut ini adalah istilah-istilah yang terdapat dalam PSAK 1 beserta definisinya:¹²

- 1) Catatan atas laporan keuangan, adalah catatan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.
- 2) Laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain.
- 3) Laporan keuangan bertujuan umum atau yang selanjutnya disebut laporan keuangan, adalah laporan keuangan yang diintensikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna tersebut.

¹²Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan: Efektif Per 1 Januari 2017*.

- 4) Material, adalah kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan keadaan terkait. Ukuran dan sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu.
- 5) Pemilik, adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.
- 6) Penghasilan komprehensif lain, adalah laporan yang berisi pos-pos penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan dan diizinkan oleh SAK.
- 7) Penyesuaian reklasifikasi, adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebenarnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 8) Standar Akuntansi Keuangan (SAK), adalah Pernyataan dan Interpretasi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya.
- 9) Tidak praktis, adalah penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional.
- 10) Total penghasilan komprehensif, adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

b. Persyaratan Penyajian Laporan Keuangan

Diatas telah disebutkan bahwa PSAK 1 itu adalah pedoman yang digunakan oleh akuntan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam Pernyataan ini mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Persyaratan penyajian laporan keuangan dimaksudkan untuk menghindari adanya informasi yang menyesatkan dalam laporan keuangan. Adapun persyaratan tersebut adalah:¹³

1) Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan defenisi, dan kriteria pengakuan asset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam kerangka dasar. Kemudian bagi entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

2) Kelangsungan usaha

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bertujuan melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan dan tidak mempunyai alternatif lainnya yang realistis selain melakukannya.

¹³*Ibid.*

3) Dasar akrual

Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Ketika entitas menerapkan basis akrual, maka entitas harus mengakui pos-pos sebagai asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban ketika pos-pos tersebut telah memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsure-unsur laporan keuangan.

4) Materialitas dan agregasi

Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang diklasifikasikan sesuai sifat dan fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Jika klasifikasi suatu pos tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

5) Saling hapus

Entitas tidak diperbolehkan melakukan saling hapus atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban, kecuali disyaratkan dalam PSAK.

6) Frekuensi pelaporan

Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap setidaknya secara tahunan. Jika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas harus mengungkapkan alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek.

7) Informasi komparatif

Informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan

deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

8) **Konsistensi penyajian**

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:

- a) Ada perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau *review* atas laporan keuangan entitas.
- b) Perubahan tersebut diperkenankan oleh SAK.

c. Struktur Laporan Keuangan

Struktur laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi lima tingkat:¹⁴

1) **Komponen laporan keuangan**

Komponen laporan keuangan merupakan klasifikasi menurut tujuan informasi yang akan disampaikan kepada pengguna. Dalam PSAK 1 komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan informasi komparatif.

2) **Unsur laporan keuangan**

Unsur laporan keuangan merupakan klasifikasi menurut kelompok besar karakteristik ekonominya. Dalam PSAK 1, unsur laporan keuangan dibagi ke dalam dua kelompok besar yakni unsur posisi keuangan yang mencakup unsur aset, liabilitas, dan ekuitas, dan unsur yang kedua adalah unsur kinerja yang meliputi unsur penghasilan dan beban.

3) **Kelompok pos laporan keuangan**

¹⁴Danik, www.syncore.co.id/id/bagaimana-struktur-laporan-keuangan-SAK. Diunduh pada tanggal 17 Februari 2018.

Kelompok pos laporan keuangan merupakan klasifikasi yang menggambarkan pos-pos yang memiliki karakteristik ekonomi sejenis, misal aset diklasifikasi ke dalam aset lancar dan tidak lancar, liabilitas diklasifikasikan ke dalam liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.

4) Pos laporan keuangan

Pos laporan keuangan merupakan klasifikasi yang menggambarkan sub-klasifikasi yang memiliki sifat dan fungsi sejenis. Misal aset lancar diklasifikasikan ke dalam kas dan bank.

5) Akun laporan keuangan

Akun laporan keuangan merupakan klasifikasi yang menggambarkan sub-klasifikasi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Misal kas dan bank diklasifikasikan menjadi akun kas dibendahara pengeluaran, dan lainnya.

d. Persyaratan Minimum Isi Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang berguna bagi sebagian besar pengguna. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan setidaknya harus menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:¹⁵

- 1) Aset;
- 2) Liabilitas;
- 3) Ekuitas;
- 4) Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
- 5) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan
- 6) Informasi arus ka

¹⁵*Ibid.*

e. Revisi PSAK 1

PSAK 1 (2009): Penyajian Laporan Keuangan mengadopsi IAS I Presentation of Financial Statements per 1 Januari 2009 dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 15 Desember 2009. PSAK 1 (2009) merupakan revisi yang menggantikan PSAK 1 (1998), PSAK 1 (1994), dan PAI 1984 Bab. II Pasal 5. PSAK 1 (revisi 2009) juga menggantikan PSAK 6 (Reformat 2007) tentang ‘Akuntansi dan Pelaporan Bagi Perusahaan dalam Tahap Pengembangan’ untuk mengatur selain bagian yang diatur dalam PSAK 19 (revisi 2000) tentang ‘Aset Tak Berwujud’.

Kemudian pada tanggal 19 Desember 2013 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia kembali mengesahkan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang merupakan revisi dari PSAK 1 yang diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2009. Untuk keperluan penyesuaian, maka DSAK IAI telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada tanggal 27 Agustus 2014. Pada tanggal 28 Oktober 2015 Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan resmi disahkan oleh DSAK. Amandemen PSAK 1 ini merupakan adopsi dari Amandemen IAS 1 *Disclosure Initiatives* yang berlaku efektif per 1 Januari 2016. Maka dapat disimpulkan bahwa PSAK 1 yang berlaku saat ini adalah PSAK revisi 2013 dan efektif per 1 Januari 2016.¹⁶

¹⁶*Ibid.*

B. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu atau penelitian relevan penting digunakan sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini, dan selain untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengutip dua hasil penelitian dari para peneliti sebelumnya yang terkait dengan penerapan PSAK 1 pada penyajian laporan keuangan. Adapun kesamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

1. Analisis Penerapan PSAK No. 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan PT. Jamsostek (Persero)

Hasil penelitian Siti Hawa dan Siti Khairani yang berjudul: “Analisis Penerapan PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan PT. Jamsostek (Persero)” menyatakan bahwa penerapan PSAK No. 1 pada aset PT. Jamsostek yang dilaporkan belum memenuhi sebagian ketentuan dari PSAK No. 01 untuk penyajian aset karena PT. Jamsostek lebih mendahulukan aset investasi. Untuk penerapan pada liabilitas sudah sesuai dengan PSAK No. 01, karena semua hutang dan pinjaman telah dicantumkan ke dalam akun liabilitas. Berikutnya, penyajian ekuitas pada laporan keuangan PT. Jamsostek sudah sesuai dengan PT. Jamsostek, karena PT. Jamsostek merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah memiliki modal saham. Persamaan penelitian Siti Hawa dan Siti Khairani dengan penelitian ini adalah pada subjek penelitian yaitu laporan keuangan, selain itu jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah objek penelitian yakni pada PT. Jamsostek.

¹⁷ Muhammad Shaleh Ash-Shiddiq, *Skripsi: Analisis Penerapan PSAK No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), h. 31-33.

2. Analisis Penerapan PSAK No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada PT. Bank Sulut (Persero)

Hasil penelitian Siti Rahmi Amir dan Tresjee Runtu yang berjudul: “Analisis Penerapan PSAK No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada PT. Bank Sulut (Persero)” mengemukakan kesimpulan bahwa penerapan PSAK No. 1 tentang penyajian laporan keuangan PT. Bank SULUT sudah sepenuhnya menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Paragraf-paragraf yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1) yang mengharuskan melakukan pengungkapan penyajian pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, serta pos-pos apa yang harus disajikan dalam laporan keuangan tersebut telah dipenuhi oleh PT. Bank Sulut. Persamaan penelitian Siti Rahmi Amir dan Tresjee Runtu dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian yakni laporan keuangan dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian dimana penelitian Siti Rahmi Amir dan Tresjee Runtu ini berupa penelitian pada Badan Umum Milik Daerah (BUMD).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana yang terstruktur dari penyelidikan yang digambarkan untuk memperoleh jawaban tentang pertanyaan penelitian. Pada pengertian luas, desain penelitian dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perancangan dan pelaksanaan penelitian. Sedangkan dalam arti sempit dan khusus, desain penelitian adalah prosedur pengumpulan dan analisis data, yang dalam artian menjelaskan metode pengumpulan data dan metode analisis apa saja yang digunakan untuk menjelaskan penelitian.¹⁸

Desain penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Pendekatan kualitatif deskriptif ekonomi tidak berupaya mengembangkan penyelidikan menurut dimensi ruang lingkup yang terlalu luas, dan tidak mengarahkan penyelidikan mengungkap objek material fakta ekonomi pada dimensi atau pada masa yang telah berlalu, juga tidak untuk mendapatkan pengetahuan tentang perkiraan-perkiraan kemungkinan peristiwa ekonomi yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Melainkan dalam pendekatan kualitatif deskriptif ekonomi, gambaran-gambaran yang digali dan ditemukan hanya sebatas untuk mendapatkan

¹⁸ Arfan Ikhsan. Misri, *Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 86.

pemahaman atas fenomena yang berada pada ruang lingkup kekinian dan sebatas pada dimensi tempat dan waktu saat perilaku berlangsung.¹⁹ Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang mengevaluasi Laporan Keuangan PT. Kawasan Industri Medan (Persero) Sumatera Utara ini, diawali dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal kebijakan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan mengkombinasikan beberapa unsur yang menyangkut pelaporan keuangan PT. Kawasan Industri Medan (Persero) Sumatera Utara dengan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

B. Variabel Penelitian

Variabel pokok pada penelitian ini adalah mengenai Penyajian Laporan Keuangan. Penyajian laporan keuangan menurut PSAK 1, entitas harus mampu menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: aset, liabilitas atau kewajiban, ekuitas atau modal, pendapatan dan beban termasuk didalamnya keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik entitas, dan arus kas. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dijelaskan bahwa setiap perseroan terbatas diwajibkan untuk membuat dan menyajikan laporan tahunan termasuk didalamnya laporan keuangan yang disusun menurut standar yang berlaku umum.

¹⁹ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 181-188.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT. Kawasan Industri Medan (Persero) Sumatera Utara. Sedangkan objek penelitiannya adalah PT. Kawasan Industri Medan (Persero) Sumatera Utara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dapat berupa studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Penggalan data lewat studi dokumentasi menjadi pelengkap proses penelitian kualitatif. Bahkan tingkat kredibilitas suatu hasil penelitian kualitatif sedikit banyaknya ditentukan oleh penggunaan dan pemanfaatan dokumen yang ada.²⁰ Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi terhadap Laporan Keuangan PT. Kawasan Industri Medan (Persero) Sumatera Utara yang telah dipublikasikan, untuk mengamati bagaimana sistematika penyajian elemen-elemen laporan keuangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan PSAK 1.

Teknik yang kedua adalah teknik observasi, observasi adalah kegiatan mengamati secara cermat dan seksama terhadap fakta, data yang mengandung informasi ekonomi yang tergal yang menjadi penyusun objek peristiwa yang diselidiki.²¹ Observasi dapat dibagi dalam beberapa

²⁰Sujoko Efferin, *et al*, *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 330-331.

²¹Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 205.

jenis, yakni:²² observasi partisipatif, observasi tersamar, dan observasi tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik observasi partisipatif dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, yakni pada PT. Kawasan Indonesia Medan (Persero).

Teknik yang terakhir adalah teknik wawancara, wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.²³

Adapun beberapa langkah yang bisa dikerjakan dalam proses pengumpulan dan analisis data pada pendekatan kualitatif deskriptif ekonomi adalah sebagai berikut:²⁴

1. Mengenali objek melalui observasi atau pengamatan secara seksama dengan bantuan kata “tanya”; di antaranya apa?, di mana?, kapan?, bagaimana?, mengapa?, siapa?, seberapa banyak?, dan berapa lama?.
2. Jawaban pokok dalam proses observasi atas kata tanya, dikembangkan lebih jauh dengan memperinci lebih detail menurut proses analisis dan sintesis atas bagian atau komponen-komponen terkait.
3. Menggunakan hasil observasi terperinci sebagai bahan wawancara atau diskusi dengan subjek penelitian untuk mendapatkan konfirmasi tentang objek tersebut menurut persepsi dan pemahaman subjek. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan makna yang berasal dari *mindset* peneliti.
4. Peneliti harus terbuka dengan informasi apapun yang bersumber dari ide dasar subjek fenomena (pelaku ekonomi), artinya informasi yang tanpa ditanyakan atau tanpa diajukan oleh peneliti, bilamana secara

²² Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 205.

²³ *Ibid.* h. 207.

²⁴ Leksono, *Penelitian*, h. 206-209.

alamiah muncul inisiatif subjek mengungkapkan informasi secara mendalam dan panjang lebar.

5. Menyusun informasi yang diperoleh dari subjek tersebut menurut kategori atau klasifikasi yang kontekstual.
6. Melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang fenomena yang diteliti, baik pada dimensi waktu saat peristiwa berlangsung maupun kemungkinannya di masa yang akan datang. Wawancara ini ditempuh untuk kepentingan mengungkap informasi yang tidak terangkat dalam observasi.
7. Melakukan wawancara lanjutan yang lebih frekuentif untuk mendapatkan informasi yang lebih luas, menggali informasi lebih dalam tentang realitas logika, realitas etika, dan realitas lainnya, guna mendapatkan pemahaman lebih utuh dan makna yang tepat.
8. Melengkapi dan menata kembali akurasi informasi yang diperoleh dari subjek penelitian dengan melakukan wawancara konfirmasi pada *co-actor* yakni untuk mendapatkan informasi mengenai keterkaitan konteks (hubungan ekonomi dan hubungan kerja) dengan subjek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik yang ditemukan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan: “bahwa dalam menganalisis data terdapat tiga tahapan yang harus dikerjakan, yakni (1) tahapan reduksi data; (2) tahap pemaparan data; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi”.²⁵

Pada analisis ini akan dilakukan perbandingan apakah Laporan Keuangan PT. Kawasan Industri Medan (Persero) Sumatera Utara telah disajikan sesuai dengan PSAK 1 atau masih perlu dilakukan penyesuaian. Apabila penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK 1, maka penyajian akun-akun yang terdapat dalam Laporan Keuangan PT. Kawasan Industri Medan (Persero) Sumatera Utara telah disajikan dengan benar. Namun apabila penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK 1, maka penyajian akun-akun yang terdapat dalam Laporan Keuangan PT. Kawasan Industri Medan (Persero) Sumatera Utara belum dapat dikatakan benar, masih perlu dilakukan penyesuaian. Adapun langkah-langkah dalam proses analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan laba ditahan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
2. Mengidentifikasi pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas pada laporan posisi keuangan.
3. Mengidentifikasi pencatatan pendapatan dan beban pada laporan laba rugi.
4. Mengidentifikasi pencatatan laba ditahan dan pembagian dividen pada laporan laba ditahan atau laporan perubahan ekuitas.
5. Mengidentifikasi pencatatan kas masuk dan kas keluar pada laporan arus kas.

²⁵Galang Surya Gumilang, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling*, Dalam *Jurnal Fokus Konseling volume 2 No. 2*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2016), h. 156.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT. Kawasan Industri Medan (PT. KIM) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bidang usaha jasa pengelolaan kawasan industri. Kawasan ini didirikan pada tanggal 7 Oktober 1988, dengan komposisi sahamnya terdiri dari Pemerintah Republik Indonesia (pusat) sebesar 60%, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 30%, dan Pemerintah Kota Medan sebesar 10%.

PT. Kawasan Industri Medan (Persero) didirikan dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Akte Notaris Soeleman Ardjasmiota, SH. No. 9 Tanggal 7 Oktober 1988 di Jakarta, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Akte Notaris Nyonya Asmara Noer, SH, No. 8 dan 9 Tanggal 10 Maret 1988 sebagai akibat dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 14 Januari 1998 dan telah diubah dengan Akte Notaris Erita Wagewali Sitohang, SH, No. 12 tanggal 7 April 2005 dan terakhir telah diubah dengan Akte Notaris Titiek Irawati, S.S.H, No. 42 tanggal 12 September 2008 sesuai dari hasil Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Industri Medan Kep-114S.MBU2008, No. Kep-23D2.MBU2008, No. 5752836K2008 dan No. 570106522008 tanggal 13 Agustus 2008.²⁶

²⁶PT. Kawasan Industri Medan, *www.kim.co.id: Sejarah PT. Kawasan Industri Medan*. Diunduh pada tanggal 18 April 2018.

Sejak didirikannya kawasan ini, seiring dengan tingginya minat investor untuk menanamkan investasinya di wilayah provinsi Sumatera Utara, maka PT. Kawasan Industri Medan (Persero) terus melakukan pengembangan lahan. Sampai pada saat ini, PT. Kawasan Industri Medan (Persero) telah memiliki luas areal 780 Ha dan akan terus dikembangkan dengan usaha sendiri maupun bekerja sama dengan pihak-pihak swasta yang berpengalaman dan profesional dalam pembangunan kawasan industri. Kawasan Industri Medan dibagi ke dalam dua areal, yakni Areal Kawasan Industri Medan Tahap I dengan luas area \pm 200 Ha, yang terletak di sebelah barat jalan tol Belmera, dan Areal Kawasan Industri Medan Tahap II dengan luas area \pm 325 Ha, yang terletak di sebelah timur jalan tol Belmera.

Tata ruang Areal Kawasan Industri Medan Tahap II, ditata dengan sangat terencana dan asri, dengan jalan utama keluar dan masuk terbuat dari beton seluas 2x17,5 meter, dan jalan sekunder selebar 12 meter. Pada kiri dan kanan jalan terdapat pipa air bersih, *hydran*, pipa gas, kabel listrik dan telepon dengan konstruksi dibawah tanah. Dengan menunjang visi “Menjadi kawasan industri yang berwawasan lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana bisnis yang dapat meningkatkan nilai bagi *shareholder* dan *stakeholders* lainnya”. PT. Kawasan Industri Medan (Persero) akan terus meningkatkan berbagai sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dunia usaha maupun investor. Sebagai kawasan industri yang terbesar di Sumatera Utara, telah bergabung sebanyak 600 pengusaha mulai dari industri dengan skala UKM, menengah hingga industri-industri multinasional dan internasional.

Terdapat berbagai hasil industri yang diproduksi dengan mengandalkan potensi dan sumber daya alam yang terdapat di Sumatera Utara, antara lain: industri kelapa sawit (*crude palm oil*) dan turunannya seperti *fatty acid*, *stERIC acid*, *palmitat acid*, *isopropil palmiat*, *gliserin*, dan jenis *oleochemical* lainnya, karet, coklat, kopi,

teh, dan hasil-hasil pertanian dari daratan tinggi Sumatera Utara berupa sayur-mayur dan buah-buahan. Industri hasil laut berupa *goldstorage*, pengalengan ikan, makanan dan minuman, industri hasil hutan, *furniture*, mebel, industri bangunan (baja), dan lain-lain.²⁷

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi Perusahaan

Visi adalah suatu pandangan yang terdapat pada organisasi atau lembaga yang mempunyai pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan apa yang harus dilakukan untuk menggapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi berkaitan dengan pandangan masa depan, menyangkut kemana suatu organisasi/atau instansi harus dibawa dan diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif.²⁸ Oleh karena itu, maka tak ayal lagi jika PT. Kawasan Industri Medan (Persero), juga memiliki visi yang akan dicapai ke depannya.

Adapun visi dari PT. Kawasan Industri Medan (Persero) adalah *“Being environmentally industrial area and provisison of infrastructure business that can improve the value for shareholders and other stakeholders”*.²⁹ Visi tersebut merupakan pernyataan cita-cita perusahaan menjadi pengelola kawasan industri terbesar di Indonesia dengan ciri kawasan berwawasan lingkungan.

²⁷ *Ibid*, PT. KIM.

²⁸ R. Jati Nurcahyo, *Keterkaitan Visi, Misi, dan Values Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Kulit Dwi Jaya*. Dalam *jurnal Khasanah Ilmu Volume 6 No. 2*, (Yogyakarta: Akademi Pariwisata BSI Yogyakarta, 2015), h. 79-80.

²⁹ PT. Kawasan Industri Medan, *www.kim.co.id:Visi dan Misi Perusahaan*. Diunduh pada tanggal 18 April 2018.

b. Misi Perusahaan

Misi adalah mendeklarasikan tentang apa yang harus dilakukan organisasi atau lembaga dalam mewujudkan visi. Misi adalah tujuan dan alasan mengapa suatu organisasi itu ada dan dapat juga diartikan sebagai serangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi, yang memuat apa yang disediakan oleh organisasi kepada masyarakat, baik berupa barang maupun jasa.³⁰ Adapun misi dari PT. Kawasan Industri Medan adalah sebagai berikut:³¹

- 1) *Providing infrastructure supporting environmentally.*
- 2) *Develop a variety of business facilities needed business and investors.*
- 3) *Improve human resource capable of providing service the prima.*

3. Tujuan dan Ruang Lingkup Usaha

Maksud dan tujuan pendirian PT. Kawasan Industri Medan (Persero) adalah untuk turut melaksanakan serta menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya menyediakan prasarana, melaksanakan pembangunan serta pengurusan perusahaan dan pengembangan serta melakukan kegiatan di bidang usaha kawasan industri (*industrial estate*) dan jasa dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, perseroan dapat melakukan usaha, sebagai berikut:³²

³⁰ *Ibid*, Nurcahyo, *Keterkaitan*, h. 79-80.

³¹ *Ibid*, PT. KIM.

³² PT. Kawasan Industri Medan, *www.kim.co.id: Tata Kelola Perusahaan*. Diunduh pada tanggal 20 April 2018.

- a. Pembebasan dan pematangan tanah untuk *kaveling* industri.
- b. Penyediaan *kaveling* dan bangunan industri siap pakai.
- c. Pengelolaan dan perawatan kawasan industri.
- d. Pelayanan jasa konsultasi bidang kawasan industri, jasa pembangunan, jasa pergudangan, dan jasa pengawasan.
- e. Kegiatan-kegiatan lain yang merupakan penunjang bagi kawasan industri.

Jasa-jasa pelayanan PT. Kawasan Industri Medan (Persero) diberikan terhadap investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri, diantaranya:

- a. Pengurusan izin-izin investasi.
- b. Jasa pengolahan limbah.
- c. Jasa keamanan lingkungan.

PT. Kawasan Industri Medan (Persero) menerapkan budaya perusahaan profesionalisme dalam bekerja, memiliki rasa kebersamaan, keterbukaan dan keteladanan yang semuanya itu didasari oleh iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Memiliki tekad untuk mengembangkan PT. Kawasan Industri Medan (Persero) menjadi perusahaan yang lebih maju dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target perusahaan.

4. Struktur Organisasi

Menurut Cyril Soffer, organisasi adalah “persekutuan atau perkumpulan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja, dimana pekerjaan dipilah-pilah menjadi tugas dan dibagikan kepada para pelaksana tugas atau pemegang jabatan untuk mendapatkan satu kesatuan hasil”.³³ Sedangkan struktur organisasi adalah cara yang menunjukkan bagaimana berbagai aktivitas yang terdapat dalam organisasi dibagi,

³³ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Bandung: Penerbit Erlangga, 2010), h. 91.

dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dengan pegawai, manajer dengan manajer, maupun sesama karyawan.³⁴ Struktur perusahaan menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola hubungan diantara fungsi dan posisi yang menunjukkan kedudukan, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab yang berbeda-beda dalam organisasi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.

Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal melalui saluran tunggal. Struktur organisasi PT. Kawasan Industri Medan (Persero) berbentuk garis, pada sistem garis wewenang dilimpahkan ke bawahannya dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya diberikan kepada atasannya. Bagan organisasi PT. Kawasan Industri Medan (Persero) dapat dilihat pada lampiran yang tersedia. Berikut ini adalah struktur organisasi PT. Kawasan Industri Medan (Persero):³⁵

a. Dewan Komisaris

- 1) Komisaris Utama : Muhyan Tambuse
- 2) Komisaris : H. Sulben Siagian
- 3) Komisaris : RE. Nainggolan

b. Direksi

- 1) Direktur Utama : Trisilo Ari Setyawan
- 2) Direktur Keuangan, SDM, dan Umum : Daly Mulyana

³⁴*Ibid*, h. 92.

³⁵PT. Kawasan Industri Medan, *www.kim.co.id: Tata Kelola Perusahaan*. Diunduh pada tanggal 20 April 2018.

- 3) Direktur Pengembangan & Operasional : Ilmi Abdullah
- c. Kepala Divisi
- 1) Div. SDM dan Umum : Ir. David Manurung
 - 2) Div. Corporate Plan & Secretary : Baringin P. Simanjuntak, SE
 - 3) Div. Sales and Marketing : Mini Herawaty, SE
 - 4) Div. Satuan Pengawas Internal : Drs. Jefry HM. Sirait, MM
 - 5) Div. Produksi dan Operasional : Ir. Arnot Siagian
 - 6) Div. Keuangan : Aris Supriyatno, SE
 - 7) Div. Pengendalian Lingkungan : Hotdo M. Aritonang, ST

5. Pembagian Tugas dan Wewenang

Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada struktur organisasi tersebut adalah:

1) Komisaris

Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perseroan. Tugas dan tanggungjawab komisaris adalah sebagai berikut:³⁶

- a) Memberikan masukan dalam penetapan visi dan misi korporasi.
- b) Memantau efektifitas dan memberikan masukan dalam penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yang ditetapkan di dalam perseroan.
- c) Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan direksi serta menandatangani laporan tersebut.
- d) Mengevaluasi dan menyetujui rencana investasi modal, akuisisi, aliansi strategis, yang melewati batas nilai yang telah disepakati antara direksi dan komisaris.
- e) Mengevaluasi kinerja direksi dan menetapkan kompensasi direksi berdasarkan wewenang yang diberikan RUPS.

³⁶*Ibid.*

- f) Memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi segala peraturan hukum yang berlaku dan memenuhi prinsip transparansi.
- g) Memastikan keandalan sistem pelaporan akuntansi dan finansial Perseroan termasuk internal dan eksternal audit serta memastikan bahwa Perseroan telah menetapkan sistem kontrol yang memadai.
- h) Melakukan pengkajian tentang rencana strategis dan rencana operasional dan keuangan sebelum diajukan ke RUPS.
- i) Mengajukan nominasi direksi atau komisaris untuk masa jabatan berikutnya atau untuk mengisi jabatan yang lowong kepada pemegang saham secara transparan, sebelum diusulkan oleh pemegang saham kepada RUPS.
- j) Memastikan direksi telah mempunyai *Succession Plan* yang efektif untuk menjamin kesinambungan dalam kepemimpinan Perseroan.
- k) Komisaris bertanggungjawab dalam menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).
- l) Komisaris bertanggungjawab mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan mengalami gejala kemunduran segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- m) Mengusulkan auditor independen untuk melakukan audit keuangan Perseroan.
- n) Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Adapun kewenangan daripada komisaris adalah, sebagai berikut:³⁷

- a) Para anggota komisaris baik secara sendiri maupun secara bersama-sama setiap waktu berhak memasuki bangunan-

³⁷*Ibid.*

bangunan dan tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan.

- b) Para anggota komisaris baik secara sendiri maupun secara bersama-sama setiap waktu berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang, memeriksa dan memverifikasi keadaan uang kas, surat berharga, serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.
- c) Bila dianggap perlu atas biaya Perseroan untuk jangka waktu tertentu dapat meminta bantuan tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan wewenangnya.
- d) Para anggota komisaris berhak meminta semua keterangan yang berkaitan dengan Perseroan kepada direksi dan direksi harus memberikan penjelasan keterangan yang diminta.
- e) Komisaris berwenang mengatur sendiri pembagian kerja diantara komisaris.

2) Direksi

Direksi bertanggungjawab atas kepengurusan Perseroan dengan itikad baik. Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab direksi yang terdiri atas dua anggota direksi atau lebih berlaku secara tenggang renteng bagi setiap anggota direksi. Pengecualian terhadap tanggung jawab secara renteng oleh anggota direksi terjadi apabila dapat membuktikan:³⁸

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

³⁸*Ibid.*

- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian.

Sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama masa jabatannya, yang menurut UUPT adalah:

- a) Membuat daftar khusus pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi.
- b) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan.
- c) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan.

Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen-dokumen lainnya disimpan di tempat kedudukan Perseroan. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi dapat memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan. Lebih lanjut, menurut Pasal 102 UUPT diatur tugas direksi sehubungan dengan pengurusan kekayaan Perseroan, dimana direksi berkewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS untuk:

- a) Mengalihkan kekayaan Perseroan, atau
- b) Menjadikan kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang.

3) Manajer Keuangan, SDM dan Umum

Dalam struktur organisasi PT. Kawasan Industri Medan (Persero), Sumatera Utara, hanya ada dua jenis manajerial, yakni manajemen keuangan, sumber daya manusia dan umum, dan manajemen pengembangan. Sebagai manajemen yang membawahi

tiga fungsi sekaligus, yakni fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi umum, sudah barang tentu manajer keuangan, sumber daya manusia dan umum memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana tanggung jawab dan wewenang dari manajer keuangan, sumber daya manusia dan umum, maka disini peneliti akan menjabarkannya menurut fungsi-fungsi yang diemban oleh manajer keuangan, sumber daya manusia dan keuangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Fungsi Keuangan

Sebagai manajer yang membawahi bidang keuangan, maka manajer keuangan, sumber daya manusia dan umum, mengemban tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

- (1) Memenuhi informasi akuntansi dan keuangan secara akurat,
- (2) Terpeliharanya tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan yang baik secara berkesinambungan,
- (3) Terciptanya efisiensi biaya dan efektifitas penggunaan dana,
- (4) Terselenggaranya tertib administrasi bidang akuntansi keuangan,
- (5) Terselenggaranya pengendalian risiko yang efektif,
- (6) Pembinaan SDM pelaksana keuangan,
- (7) Menetapkan tugas-tugas asisten manajer dan pelaksana keuangan.

b) Fungsi Sumber Daya Manusia

Dalam fungsi sumber daya manusia, manajer keuangan, sumber daya manusia dan umum memiliki tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya penggajian dan kesejahteraan bagi karyawan,

- (2) Terlaksananya mutasi, promosi dan peningkatan kualitas karyawan,
- (3) Terselenggaranya tertib administrasi karyawan dan terciptanya disiplin kerja,
- (4) Terselenggaranya fungsi kesekretariatan,
- (5) Mengusulkan pengembangan SDM,
- (6) Mengusulkan pengembangan organisasi,
- (7) Melaksanakan rencana kerja anggaran dan perusahaan,
- (8) Mengusulkan evaluasi dan pengembangan sistem manajemen SDM,
- (9) Memberikan izin cuti dan tindakan personalia lainnya kepada karyawan.

c) Fungsi Umum

Berikut ini adalah tugas yang harus diemban oleh seorang manajer keuangan, sumber daya manusia dan umum, dalam bidang umum:

- (1) Terpenuhinya barang dan jasa tepat waktu,
- (2) Terselenggaranya administrasi aset tetap dan inventarisasi lainnya,
- (3) Terciptanya kawasan industri yang tertib dan aman,
- (4) Terselenggaranya pengelolaan rumah tangga perusahaan dan pelayanan umum dengan baik.

4) Manajer Pengembangan

Manajer pengembangan mengemban tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut:

- a) Terciptanya prosedur pengelolaan risiko secara terpadu,
- b) Terselenggaranya manajemen risiko secara efektif dan efisien,
- c) Memberikan rekomendasi kepada direksi atas pilihan keputusan, penggunaan rekanan, dan perubahan sistem,

- d) Memberikan masukan kepada direksi mengenai teknologi dan sistem,
- e) Menetapkan jadwal atau tanggal setiap tahapan manajemen risiko,
- f) Mengusulkan sanksi kepada direksi terhadap biro yang tidak taat terhadap aturan manajemen risiko.

B. Hasil Penelitian

1. Laporan Keuangan PT. Kawasan Industri Medan

a. Laporan Posisi Keuangan Komparatif

Tabel 4.1 Laporan Posisi Keuangan PT. Kawasan Industri Medan

PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO)		
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Periode 31 Desember 2017		
(Disajikan dalam Rupiah)		
Uraian	2017	2016
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	80.684.400.650	83.023.620.299
Piutang – neto	87.153.245.517	43.471.218.839
Piutang lain-lain	12.852.452.289	12.917.079.027
Piutang Karyawan	366.758.657	128.348.547
Persediaan – neto	94.136.106.747	102.026.498.055
Pajak dibayar dimuka	11.521.687.487	7.156.103.852
Biaya dibayar Dimuka	134.672.597	583.880.629
JUMLAH ASET LANCAR	286.849.323.944	249.306.749.248
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang non lancar – neto	5.062.316.933	5.313.446.967
Aset pajak tangguhan – neto	372.056.520	372.056.520
Aset tetap – neto	12.317.378.429	9.443.330.963
Properti Investasi – neto	96.397.906.106	39.024.353.799
Aset dalam Konstruksi	14.417.495.046	72.123.129.772
Sarana dan Prasarana – neto	113	113
Aset lain-lain – neto	1.258.341.719	873.037.999
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	129.825.494.866	127.149.356.133

JUMLAH ASET	416.674.818.810	376.456.105.381
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	5.727.486.500	21.331.910.715
Utang lain-lain	824.415.877	708.059.301
Biaya yang masih harus dibayar	7.248.662.458	5.998.748.735
Utang Pajak	20.618.858.685	9.927.561.919
Pendapatan Diterima Dimuka	4.994.624.176	4.827.077.962
Liabilitas Diestimasi atas Sarana & Prasarana	1.828.610.436	1.828.610.436
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	41.242.658.132	44.621.969.068
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Pendapatan yang Ditangguhkan	104.176.340	
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	104.176.340	
JUMLAH LIABILITAS	41.346.834.472	44.621.969.068
EKUITAS		
Modal Saham	150.000.000.000	150.000.000.000
Tambahan modal disetor		
Penghasilan Komprehensif lain		
Saldo laba (defisit)		
Ditentukan penggunaannya	178.214.499.820	145.637.771.409
Tidak ditentukan penggunaannya	47.113.484.519	36.196.364.904
JUMLAH EKUITAS	375.327.984.339	331.834.136.313
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	416.674.818.811	376.456.105.381

b. Laporan Laba Rugi Komparatif

Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi PT. Kawasan Industri Medan

PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO)		
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Periode Berahir 31 Desember 2017		
Uraian	2017	2016
Penjualan	Rp 81.785.137.640	Rp 41.252.880.811
Beban Pokok Penjualan	Rp (23.583.247.317)	Rp (4.171.424.992)
LABA BRUTO	Rp 58.201.890.323	Rp 37.081.455.819
Penjualan lain-lain	Rp 68.319.932.767	Rp 56.434.747.040
Beban Pokok Penjualan lain	Rp (58.289.207.549)	Rp (33.410.599.528)
Beban Operasional	Rp (22.897.526.800)	Rp (22.705.618.772)
LABA USAHA	Rp 45.335.088.741	Rp 37.399.984.559
Beban Keuangan	Rp (42.332.388)	Rp (50.358.459)
Pendapatan Keuangan	Rp 5.743.861.167	Rp 4.785.782.054
LABA SEBELUM PAJAK	Rp 51.036.617.520	Rp 42.135.408.154
Manfaat (beban) pajak penghasilan	Rp (3.923.133.000)	Rp (5.939.043.250)
LABA TAHUN BERJALAN	Rp 47.113.484.520	Rp 36.196.364.904
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan aktuarial atas program imbalan pasti - neto setelah pajak		
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	Rp 47.113.484.520	Rp 36.196.364.904

2. Ilustrasi Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 1

a. Laporan Posisi Keuangan

Tabel 4.3 Ilustrasi Penyajian Laporan Posisi Keangan Menurut PSAK 1

KELOMPOK USAHA XYZ		
Laporan posisi keuangan per 31 Desember 20X7		
(dalam ribuan Rupiah)		
	20X7	20X6
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	312.400	322.900
Piutang Usaha	91.600	110.800
Persediaan	135.230	132.500
Aset Lancar lain	25.650	12.540
Total Aset Lancar	564.880	578.740
Aset Tidak Lancar		
Aset keuangan tersedia untuk dijual	142.500	156.000
Investasi dalam entitas asosiasi	100.150	110.770
Aset tetap	350.700	360.020
Aset tak berwujud lain	227.470	227.470
<i>Goodwill</i>	80.800	91.200
Total Aset Tidak Lancar	901.620	945.460
Total Aset	1.466.500	1.524.200
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha dan utang lain	115.100	187.620
Pinjaman jangka pendek	150.000	200.000
Bagian pinjaman jangka panjang	10.000	20.000
Utang pajak jangka pendek	35.000	42.000
Provisi jangka pendek	5.000	4.800
Total Liabilitas Jangka Pendek	315.100	454.420
Liabilitas Jangka Panjang		
Pinjaman jangka panjang	120.000	160.000
Pajak tangguhan	28.800	26.040
Provisi jangka panjang	28.850	52.240
Total Liabilitas Jangka Panjang	177.650	238.280
Total Liabilitas	492.750	692.700

EKUITAS		
Ekuitas yg dpt diatribusikan kpd pemilik entitas induk		
Modal Saham	650.000	600.000
Saldo Laba	243.500	161.700
Komponen ekuitas lain	10.200	21.200
	<hr/>	<hr/>
	903.700	782.900
Kepentingan non pengendali	70.050	48.600
	<hr/>	<hr/>
Total Ekuitas	973.750	831.500
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.466.500	1.524.200

b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel 4.4 Ilustrasi Penyajian Laporan Laba Rugi menurut PSAK 1

KELOMPOK USAHA XYZ		
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7 (dalam ribuan rupiah)		
	20X7	20X6
Pendapatan	390.000	355.000
	-	-
Beban pokok penjualan	245.000	230.000
Laba bruto	145.000	125.000
Penghasilan laba	20.667	11.300
Biaya distribusi	-9.000	-8.700
Beban administrasi	-20.000	-21.000
Beban lain-lain	-2.100	-1.200
Biaya pendanaan	-8.000	-7.500
Bagian laba entitas asosiasi	35.100	30.100
Laba sebelum pajak	161.667	128.000
Beban pajak penghasilan	-40.417	-32.000
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	121.250	96.000
Kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	0	-30.500
Laba tahun berjalan	121.250	65.500
Penghasilan komperhensif lain		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan revaluasi aset teap	933	3.367
Pengukuran kembali atas program badan pasti	-667	1.333
Bagian penghasilan komperhensif lain entitas asosiasi	400	-700
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-166	-1.000
	500	3.000
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	5.334	10.667
Aset keuangan tersedia untuk dijual	-24.000	26.667
Lidung nilai atas arus kas	-667	-4.000
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	4.833	-8.334
	-14.500	25.000

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	-14.000	28.000
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	107.250	93.500
Laba yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	97.000	52.400
Kepentingan non pengendali	24.250	13.100
	121.250	65.500
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	85.800	74.800
Kepentingan non pengendali	21.450	18.700
	107.250	93.500
Laba per saham (dalam rupiah)	0,46	0,3

3. Pembahasan

a. Laporan Posisi Keuangan

Dalam paragraf 54 PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan dijelaskan bahwasanya laporan posisi keuangan mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut:

- 1) Aset tetap
- 2) Properti investasi
- 3) Aset tak berwujud
- 4) Aset keuangan
- 5) Investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas
- 6) Persediaan
- 7) Piutang usaha dan piutang lain
- 8) Kas dan setara kas
- 9) Aset yang dimiliki untuk di jual
- 10) Utang usaha dan utang lain
- 11) Provisi

- 12) Liabilitas keuangan
- 13) Pajak kini dan pajak tangguhan
- 14) Ekuitas
- 15) Kepentingan non pengendali
- 16) Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk.

Kemudian pada paragraf 60 PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan dijelaskan kembali, bahwasanya entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

Jika kita bandingkan antara laporan posisi keuangan PT. Kawasan Industri Medan seperti pada Tabel 4.1 dengan ilustrasi penyajian laporan posisi keuangan menurut PSAK 1 seperti yang digambarkan pada Tabel 4.3. Disana kita dapat melihat bahwasanya dalam penyajian laporan posisi keuangan, PT. Kawasan Industri Medan (Persero) sudah menerapkan penyajian laporan posisi keuangan sebagaimana yang diilustrasikan dalam PSAK 1. Hal ini bisa dibuktikan dengan pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan PT. Kawasan Industri Medan (persero) sudah mencakup penyajian jumlah pos-pos sebagaimana dalam paragraf 54 PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan.

Selain itu, PT. Kawasan Industri Medan (Persero), juga menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 60 PSAK tentang penyajian laporan keuangan. Namun ada sedikit perbedaan antara penyajian laporan posisi keuangan PT. Kawasan Industri Medan (Persero) dengan yang diilustrasikan pada PSAK 1. Hal ini bisa dilihat dengan membandingkan kedua tabel diatas. Pada Tabel 4.1, pada klasifikasi ekuitas, PT. Kawasan Industri

Medan (Persero) tidak menyajikan pos kepentingan non pengendali sebagaimana yang diilustrasikan pada Tabel 4.3. Meskipun tidak dicantumkan dalam laporan posisi keuangan, hal tersebut tidak dianggap menyalahi mengingat bahwasanya PT. Kawasan Industri Medan (Persero) bukanlah entitas anak (anak perusahaan lain).

Untuk penamaan akun, baik laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Maria Purnama Br. Purba selaku Spv. Akuntansi PT. Kawasan Industri Medan (Persero) Sumatera Utara (terlampir). Beliau menyebutkan bahwasanya untuk penamaan akun laporan keuangan, PT. Kawasan Industri Medan memiliki sistem penamaan akun tersendiri. Walaupun demikian, sistem penamaan akun ini tetap mengacu kepada ketentuan PSAK 1, hanya saja entitas mengambil istilah lain yang memiliki arti kata yang sama dengan pos-pos akun sebagaimana dalam PSAK 1.

b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Dalam paragraf 82 PSAK 1 disebutkan bahwasanya informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi sebagai tambahan atas pos-pos yang disyaratkan oleh SAK, laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan berikut:

- 1) Pendapatan
- 2) Biaya keuangan
- 3) Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura
- 4) Beban pajak
- 5) Operasi yang dihentikan

Jika kita bandingkan antara laporan laba rugi dan komprehensif lain PT. Kawasan Industri Medan seperti pada Tabel 4.2 dengan ilustrasi penyajian laporan posisi keuangan menurut

PSAK 1 seperti yang digambarkan pada Tabel 4.3. Disana dapat dilihat bahwasanya dalam penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, PT. Kawasan Industri Medan (Persero) sudah menerapkan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagaimana yang diilustrasikan dalam PSAK 1. Hal ini bisa dibuktikan dengan pos-pos yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT. Kawasan Industri Medan (persero) sudah mencakup penyajian jumlah pos-pos sebagaimana dalam paragraf 82 PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT. Kawasan Industri Medan (Persero) tidak menyajikan jumlah pos sebagaimana yang disyaratkan dalam PSAK 1 Paragraf 81B, yang menyatakan bahwa:

“Entitas menyajikan pos-pos berikut sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebagai alokasi dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode:³⁹

- 1) Laba rugi selama periode yang dapat diatribusikan kepada:
 - a) Kepentingan non pengendali, dan
 - b) Pemilik entitas induk.
- 2) Penghasilan komprehensif selama periode yang dapat diatribusikan kepada:
 - a) Kepentingan non pengendali, dan
 - b) Pemilik entitas induk.”

Hal tersebut dikarenakan mengingat bahwasanya PT. Kawasan Industri Medan (Persero) bukanlah entitas anak (anak perusahaan lain). Tetapi ada satu hal yang menjadi permasalahan disini, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang disajikan oleh PT. Kawasan industri Medan (Persero), tidak menyajikan laba per lembar sahamnya. Hal ini, seharusnya dicantumkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, meskipun diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

³⁹*Ibid, IAI, PSAK 1 Efektif Per 1 Januari 2017.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwasanya PT. Kawasan Industri Medan (Persero), Sumatera Utara telah mampu menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (PSAK 1) dalam penyajian laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Meskipun ada sedikit perbedaan antara format penyajian laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain) PT. Kawasan Industri Medan (Persero), Sumatera Utara dengan format penyajian sebagaimana di ilustrasikan pada PSAK 1. Hal tersebut tetap tidak mengurangi relevansi dari laporan keuangan yang disajikan oleh entitas, mengingat bahwa entitas bukanlah anak perusahaan. Sementara untuk penamaan akun, PT. Kawasan Industri Medan (Persero) Sumatera Utara memiliki sistem penamaan tersendiri dengan syarat tetap berpedoman kepada ketentuan PSAK 1.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Penerapan PSAK 1 Pada Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan (Studi Kasus: PT. Kawasan Industri Medan (Persero), Sumatera Utara)”, maka saran yang dapat diberikan oleh Peneliti adalah PT. Kawasan Industri Medan (Persero), Sumatera Utara, harus tetap bisa menjaga kualitas dan relevansinya dalam pembuatan laporan keuangan guna menghasilkan informasi yang memiliki kualitas daya banding yang tinggi serta untuk meningkatkan kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2014.
- Efferin, Sujoko. *Et al. Metode Penelitian Akuntansi: Menangkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan: Efektif per 1 Januari 2017*, Jakarta: IAI, 2016.
- Ikhsan, Arfan. Misri. *Metode Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Medan: Citapustaka Media Perintis. 2012.
- Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Martani, Dwi. *et al. Akuntansi Keuangan Menengah: Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Sardjono, Agus. *et al. Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014.
- Solihin, Ismail. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Penerbit Erlangga. 2010.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2012.

Jurnal

- Gumilang, Galang Surya. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. Dalam Jurnal Fokus Konseling volume 2 No. 2..* Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri. 2016.
- Jati Nurcahyo, R. *Keterkaitan Visi, Misi, dan Values Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Kulit Dwi Jaya. Dalam jurnal Khasanah Ilmu Volume 6 No. 2.* Yogyakarta: Akademi Pariwisata BSI Yogyakarta. 2015.

Skripsi

Ash-Shiddiq, Muhammad Shaleh. *Skripsi: Analisis Penerapan PSAK No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 2016.

Website

Danik, www.syncore.co.id/id/bagaimana-struktur-laporan-keuangan-SAK.

Diunduh pada tanggal 17 Februari 2018.

PT. Kawasan Industri Medan. www.kim.co.id: *Sejarah PT. Kawasan Industri Medan*. Diunduh pada tanggal 18 April 2018.

PT. Kawasan Industri Medan. www.kim.co.id: *Tata Kelola Perusahaan*. Diunduh pada tanggal 20 April 2018.

PT. Kawasan Industri Medan. www.kim.co.id: *Visi dan Misi Perusahaan*. Diunduh pada tanggal 18 April 2018.